

## Implementasi Program Penanggulangan *Stunting* di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Farida Hani Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Rudi Subiyakto<sup>3</sup>, Fitri Kurnianingsih<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,  
Kepulauan Riau 29115; Telepon: (0771) 4500089  
Email Korespondensi: [faridahsw10@gmail.com](mailto:faridahsw10@gmail.com)

### Abstract

*Stunting is a lack of nutritional intake with a long duration, starting from pregnancy to 24 months. The prevalence of stunted children recorded at the Tanjungpinang City Health, Population Control, and Family Planning Office increased by 1.3% in 2020 to 3.49% in 2021 and 3.91% in 2022. Based on these data, it can be seen that there has been an increase in stunting cases in Tanjungpinang City. The problem that will be the focus of discussion in this study is how to implement stunting prevention programs in the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office. This study aims to analyze the implementation of stunting prevention programs in the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office. The research approach used in this study is explained using a qualitative approach. The theory used by researchers in implementation uses Soren C. Winter's theory which includes indicators: the behavior of relationships between organizations, the behavior of lower-level implementors (apparatus / bureaucrats) and the behavior of target groups. The implementation of the stunting alleviation program at the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office has been going well, but it is still not optimal. This is because there are still people who do not know about stunting, socialization carried out by puskesmas officers and posyandu cadres has not been thoroughly carried out. However, the response from the community itself is very good or positive, this is because puskesmas officers continue to provide assistance and check regularly. The commitment made by the health Office in collaboration with the Ministry of Religious Affairs made an MOU so that these brides-to-be get IEC (Educational Information Communication) and with the formation of the Stunting Reduction Acceleration Team at the Tanjungpinang City level, this is nothing but an effort to reduce stunting rates in Tanjungpinang City.*

**Keywords:** Implementation, Mitigation, Stunting

### Abstrak

*Stunting* merupakan kurangnya asupan gizi dengan durasi yang cukup lama, dimulai dari kehamilan sampai dengan 24 bulan. Prevelensi anak yang mengalami *stunting* yang terdata di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan 1,3% pada tahun 2020 menjadi 3,49% di tahun 2021 dan 3,91% di tahun 2022. Berdasarkan data tersebut terlihat telah terjadi peningkatan kasus *stunting* di Kota Tanjungpinang. Persoalan masalah yang akan menjadi suatu fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan peneliti dalam implementasi menggunakan teori Soren C. Winter yang meliputi indikator: perilaku hubungan antara organisasi sudah berjalan dengan efektif dilihat dari dimensi komitmen dan koordinasi sudah adanya kesepakatan bersama dengan instansi terkait dan adanya koordinasi yang dilakukan dalam hal pengambilan keputusan. Untuk indikator perilaku birokrasi level bawah sudah berjalan efektif hal ini dapat dilihat dari sudah adanya inovasi dalam penanggulangan *stunting*. Selanjutnya indikator perilaku kelompok sasaran sudah terdapat respon positif dari masyarakat namun masih memerlukan peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan.

## ***Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang***

Kesimpulan dari implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang sudah berjalan maksimal. Saran untuk perbaikan yaitu lebih meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan pemahaman terhadap pola asuh anak.

**Kata Kunci:** Implementasi, Penanggulangan, *Stunting*

### **PENDAHULUAN**

Majelis Kesehatan Dunia (*World Health Assembly*, WHA) mempunyai target penurunan sebesar 40% angka *stunting* di seluruh dunia pada tahun 2025. Laporan terbaru dari Global Nutritional Report pada 2018 menyebut ada 15 negara (12 di Eropa 3 di Asia) yang memiliki tingkat berat badan lahir rendah. Ada sekitar 150,8 juta (22,2%) anak yang menderita *stunting* menjadi salah satu faktor terhambatnya perkembangan manusia di dunia. *World Health Organization* (WHO) menetapkan lima daerah subregion dengan prevalensi *stunting*, termasuk Indonesia di regional Asia Tenggara (36,4%) (United Nations, 2018). Dalam menanggapi tingginya prevalensi *stunting* ini, yang terkonsentrasi di beberapa dunia negara-negara termiskin, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengusulkan target global penurunan kejadian *stunting* pada anak dibawah usia lima tahun sebesar 40% pada tahun 2025 (Mitra, 2015).

Hasil riset pada tahun 2018 di Indonesia ditemukan 29,9 persen balita di bawah usia 24 bulan menderita *stunting*. Angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih di atas rata-rata kawasan (22 persen). Riset yang sama dijumpai bahwa 30,8 persen balita menderita *stunting* turun dari tingkat prevalensi 37 persen yang diperkirakan pada tahun 2013 (Debora Comini United Nations Children's Fund (UNICEF), 2020).

Tahun 2017 pemerintah sudah menerbitkan program rencana aksi nasional penanganan *stunting* di tingkat nasional, daerah dan desa. Program ini mendahulukan penanganan untuk gizi spesifik dan sensitif pada 1000 HPK hingga balita umur 6 tahun. Penyebab *Stunting* yaitu asupan gizi yang kurang dalam jangka panjang, karena itu dapat menimbulkan terganggu tumbuh kembangnya, seperti tinggi badan lebih rendah dari usia standarnya (Laili & Andriani, 2019).

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR/MPR RI pada (16/8/2022). Menyampaikan ada lima agenda untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satunya presiden menyampaikan, *stunting* harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata agar semua agenda dapat ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Merujuk dari hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2019, angka *stunting* di Indonesia menurun menjadi 27,7 % dan angka tersebut dapat diturunkan lagi menjadi 24,4 % pada tahun

2021. Hasil SSGBI pada 2019, memperlihatkan bahwa dari 213.471 balita di Kepulauan Riau sebesar 35.863 balita (16.8%) dinyatakan *stunting*, akan tetapi prevalensinya sudah lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata nasional (27,7%). SSGBI berikutnya tahun 2021, memperlihatkan adanya kenaikan prevalensi *stunting* menjadi 39.217 (17,6%) dari populasi balita yang pada saat itu berjumlah 222.827 balita. Tahun 2019, Provinsi Kepulauan Riau berada di urutan terbaik kedua setelah Provinsi Bali, namun pada tahun 2021 urutan Provinsi Kepulauan Riau telah bergeser menjadi urutan ke keempat setelah Bali, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada tahun 2014 pemerintah telah berkomitmen, target prevalensi nasional harus dapat mencapai sebesar 14%, sehingga diperlukan keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan strategi yang tepat untuk melakukan percepatan penurunan *stunting* (Yudiana, n.d.).

Berdasarkan program pemerintah Indonesia “Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan”. Masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK), berawal sejak perencanaan hingga anak berusia 2 tahun, merupakan waktu paling kritis dalam memperbaiki tumbuh kembang dan kognitif anak. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa pertumbuhan pada anak tidak hanya 2 tahun pertama saja, jika pemerintah hanya fokus pada 1000 HPK dengan membiarkan tumbuh kembang berikutnya, maka pasca program 1000 HPK akan bermunculan masalah gizi yang lain (Djauhari, 2017).

Usia 0-6 bulan merupakan masa paling kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, karena dimasa inilah periode tumbuh kembang anak yang paling optimal, baik untuk inteligensi maupun fisiknya. Periode ini dapat berhasil apabila anak mendapatkan asupan gizi yang tepat dengan kebutuhannya secara optimal. Bayi usia 0-6 bulan seharusnya hanya diberi Air Susu Ibu saja (ASI eksklusif), tetapi banyak diantara para ibu yang sudah memberikan makanan pendamping ASI (Selanjutnya di singkat MP-ASI) pada bayi usia kurang dari 6 bulan. Makanan pendamping ASI merupakan makanan maupun minuman yang mengandung zat gizi, yang seharusnya diberikan pada bayi atau anak berusia 6-24 bulan agar terpenuhi kebutuhan gizinya selain ASI. Dalam memberikan makanan pendamping ASI haruslah disesuaikan dengan perkembangan sistem pencernaan bayi, mulai dari makanan bertekstur kental, cair, semi padat hingga makanan padat (Maieftiki et al., 2020).

Munculnya masalah gizi pada anak, anak balita dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Secara langsung dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu anak tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai dan anak menderita penyakit infeksi. Kemiskinan juga merupakan salah satu penyebab munculnya kasus gizi buruk terkait ketersediaan dan konsumsi pangan keluarga (Farida et al., 2021). Artinya masalah *stunting* di Indonesia harus ada

## ***Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang***

penanggulangannya dengan cara terus menerus dan berkesinambungan dengan melibatkan kerja sama antar pemangku kebijakan agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Provinsi bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Provinsi seutuhnya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Provinsi.

Pada data Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2018 dalam 4 tahun terakhir, *stunting* memiliki angka tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurus, kurang, dan gemuk (Qolbi et al., 2020). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tingkat prevalensi mengalami penurunan dari 36,8% di tahun 2007 menjadi 24,4% di tahun 2021. Namun, dari tahun ke tahun, tingkat prevalensi *stunting* cenderung tidak tetap atau berubah-ubah, hal tersebut terlihat pada periode 2017-2013 yang mengalami peningkatan, kemudian periode 2013-2016 menurun, dan kembali naik pada periode 2016-2018, yang selanjutnya terus menurun pada periode 2018-2021. Namun tingkat prevalensi tersebut masih berada di atas standar WHO yang menetapkan ambang batas prevalensi *stunting* sebesar 20% (Keahlian et al., 2022).

Pencegahan dan penanggulangan *stunting* memerlukan upaya yang bersifat menyeluruh dan saling terintegrasi. Perpres Nomor 42 Tahun 2013 adalah salah satu strategi dalam *Scaling Up Nutrition* (SUN) yang melibatkan berbagai sektor yang perlu disikapi dengan koordinasi kuat dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Penyebarluasan informasi dan advokasi kepada pemangku kepentingan lain di berbagai lintas sektor industri secara merata, dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan pendidikan agar jajaran empat esponsibi dapat menjelaskan dan melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* adalah peraturan presiden yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengendalikan upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia dan merupakan salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI) adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko *stunting* (Dermawan, Ari. Mahanim. Siregar, 2022).

Berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, yang menyerukan pembentukan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) untuk menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan pangan dan gizi. Selain itu, Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang mampu meningkatkan pendidikan terkait gizi seimbang, penyajian makanan sehat dan percepatan perbaikan gizi (Arrias et al., 2019). Adapun berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.11 Tahun 2016, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang kesehatan dan KB.

Di Kota Tanjungpinang Tingkat prevalensi *stunting* kurang menurut umur sebesar 18,8% pada tahun 2021. Artinya berada di atas rata-rata provinsi Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau sendiri memiliki prevelensi *stunting* terendah nomor empat di Indonesia (Kominfo, 2022). Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abudullah menyampaikan saat membuka kegiatan pencanangan *pilot project*, tanggap dan tangguh bencana yang digelar TP-PKK Tanjungpinang, di aula dinas sosial setempat, menyebut ada sekitar 487 (3.64%) orang anak yang menderita *stunting* di Kota Tanjungpinang.

Dalam rekonsiliasi *stunting* tingkat Kota Tanjungpinang 2022, dua kelurahan tercatat memiliki angka *stunting* tertinggi dan ini menjadi perhatian khusus Walikota Tanjungpinang Rahma. Dua kelurahan ini meliputi Kelurahan Air Raja dan Pinang Kencana. Adapun upaya yang sudah dilakukan di Kota Tanjungpinang dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi membangun komitmen dan merumuskan kebijakan, melaksanakan 8 aksi konvergensi, koordinasi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, serta peningkatan peran TP-PKK dan berbagai lintas sektor (Tika, 2022). Meski demikian, berdasarkan jumlah data kasus *stunting* masih ada kecamatan di Kota Tanjungpinang yang menjadi lokus dengan perolehan status *stunting* tinggi.

Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No. 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 juga membahas mengenai berbagai masalah serta isu-isu strategis daerah Kota Tanjungpinang, khususnya dalam pengelompokan kesehatan, salah satu didalamnya masih ditemukannya balita *stunting*.

Berikut jumlah kasus *stunting* di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan 3,3% pada tahun 2018 kemudian 1,9% pada tahun 2019 turun menjadi 1,3% pada tahun 2020 kemudian mengalami kenaikan 3,49% di tahun 2021 dan 3,91% di tahun 2022 yang terdata di Dinas

***Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang***

Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Data Stunting Balita Kota Tanjungpinang Berdasarkan Hasil ePPGM Tahun 2020-2022**

No	KEC	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jlh Balita	%	Jlh Balita	%	Jlh Balita	%	Jlh Balita	%	Jlh Balita	%
1.	Kec. Tanjungpinang Timur	95	1.9	93	1.8	91	1.4	274	4.6	213	4.8
2.	Kec. Tanjungpinang Barat	9	0.4	24	0.8	9	0.3	10	0.3	39	1.4
3.	Kec. Bukit Bestari	133	5.3	45	1.3	49	1.3	161	5.0	84	3.7
4.	Kec. Tanjungpinang Kota	122	16	75	11.8	37	3.0	21	1.8	80	7.4
<b>Jumlah</b>		359	3.3	237	1.9	186	1.3	466	3.49	416	3.91

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, 2023 (telah diolah kembali)

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus *stunting* masih belum optimal dan perlu adanya penanganan secara intensif oleh para implementor. Selain itu penyebab kasus *stunting* ini masih ada yaitu kurangnya dukungan dari birokrat level bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan gizi anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang dengan menggunakan teori Soren C. Winter meliputi tiga variabel yakni: Perilaku organisasi dan antar organisasi, Perilaku birokrasi level bawah, dan Perilaku kelompok sasaran.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Penanggulangan *Stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang”**.

Berdasarkan latar belakang yang diteliti oleh peneliti, Bagaimana implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Kota Tanjungpinang. Dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui implementasi

program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian tentu saja menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan urgensi dari penelitian tersebut untuk apa, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif. Dengan objek penelitian untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni pada program yang dijalankan. Dengan sumber data secara primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Sugiyono, (2010:7).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Stunting* sangat perlu untuk ditangani hal ini menyangkut kualitas sumber daya manusia. *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang berumur di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Disamping itu, *stunting* juga beresiko pada terhambatnya pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, hal lain dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan kognitif yang akan mempengaruhi tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.

Kota Tanjungpinang menjadi kota yang memiliki prevalensi balita *stunting* tertinggi ke-4 di Kepulauan Riau, setelah Lingga, Natuna, dan Bintan. Prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang dari 3,3% pada tahun 2018 kemudian 1,9% pada tahun 2019 turun menjadi 1,3% pada tahun 2020 kemudian mengalami kenaikan 3,49% di tahun 2021 dan 3,91% di tahun 2022.

Dalam rangka penurunan angka *stunting* di Kota Tanjungpinang pemerintah Kota Tanjungpinang melaksanakan program pemberian tablet tambahan darah dan asupan nutrisi pada remaja putri serta ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan, dan pemenuhan gizi pada anak bayi 2 tahun. kemudian, para ibu yang baru melahirkan juga dihimbau inisiasi pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, menyusui dini, pemberian makanan pendamping ASI pada anak baduta, pemberian imunisasi/sistem kekebalan tubuh imun yang lengkap dengan Vitamin A, dan pemantauan proses laju pertumbuhan di Posyandu. untuk mengetahui bagaimana program

***Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang***

tersebut dilaksanakan maka penulis memfokuskan tiga indikator dalam implementasi kebijakan dengan menggunakan Teori Soren C. Winter yaitu: 1) perilaku organisasi dan antar organisasi; 2) perilaku birokrasi level bawah; 3) perilaku kelompok sasaran.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, Prevelensi *stunting* di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari 5 tahun terakhir yaitu 2018-2022 bahwa *stunting* yang terjadi di Kota Tanjungpinang masih mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

**Tabel 1. Prevelensi balita stunting di puskesmas Kota Tanjungpinang tahun 2018**

No	Puskesmas	Jumlah balita yang diukur	2018	
			Jlh	%
1.	Batu 10	1435	58	4,1
2.	Mekar Baru	1847	23	1,2
3.	Melayu Kota Piring	1758	14	0,8
Kec.Tanjungpinang Timur		5040	95	1,9
4.	Kampung Bugis	762	122	15
Kec.Tanjungpinang Kota		762	122	0,3
5.	Tanjungpinang	2408	9	0,4
Kec.Tanjungpinang barat		2408	9	0,4
6.	Sei Jang	2224	83	3,7
7.	Tanjung Unggat	298	50	16,8
Kec. Bukit Bestari		2522	133	5,3
Total		10732	359	3,3

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, 2023 (telah diolah kembali)

**Tabel 2. Prevelensi balita stunting di puskesmas Kota Tanjungpinang tahun 2019**

No	Puskesmas	Jumlah balita yang diukur	2019	
			Jlh	%
1.	Batu 10	1435	58	4,1
2.	Mekar Baru	2362	15	0,6
3.	Melayu Kota Piring	1414	20	1,4
Kec.Tanjungpinang Timur		5211	93	1,8
4.	Kampung Bugis	636	75	11,8
Kec.Tanjungpinang Kota		636	75	11,8
5.	Tanjungpinang	2861	24	0,8
Kec.Tanjungpinang barat		2861	24	0,8
6.	Sei Jang	3199	28	0,9
7.	Tanjung Unggat	306	17	5,5
Kec. Bukit Bestari		3505	45	1,3
Total		12213	237	1,9

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, 2023 (telah diolah kembali)

**Tabel 3. Prevelensi balita stunting di puskesmas Kota Tanjungpinang tahun 2020**

No	Puskesmas	Jumlah balita yang diukur	2020	
			Jlh	%
1.	Batu 10	2764	40	1,4
2.	Mekar Baru	2021	12	0,5
3.	Melayu Kota Piring	1789	39	2,2
Kec.Tanjungpinang Timur		6574	91	1,3
4.	Kampung Bugis	1235	37	3,0
Kec.Tanjungpinang Kota		1235	37	3,0
5.	Tanjungpinang	3177	9	0,3
Kec.Tanjungpinang barat		3177	9	0,3
6.	Sei Jang	3009	9	0,3
7.	Tanjung Unggat	640	40	6,3
Kec. Bukit Bestari		3649	49	1,4
Total		14635	186	1,4

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, 2023 (telah diolah kembali)

**Tabel 4. Prevelensi balita stunting di puskesmas Kota Tanjungpinang tahun 2021**

No	Puskesmas	Jumlah balita yang diukur	2021	
			Jlh	%
1.	Batu 10	2461	231	9,4
2.	Mekar Baru	1913	6	0,3
3.	Melayu Kota Piring	1533	37	2,4
Kec.Tanjungpinang Timur		5907	274	4,6
4.	Kampung Bugis	1194	21	1,8
Kec.Tanjungpinang Kota		1194	21	1,8
5.	Tanjungpinang	3023	10	0,3
Kec.Tanjungpinang barat		3023	10	0,3
6.	Sei Jang	2514	130	5,2
7.	Tanjung Unggat	725	31	4,3
Kec. Bukit Bestari		3239	161	5,0
Total		13363	466	3,49

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, 2023 (telah diolah kembali)

**Tabel 5. Prevelensi balita stunting di puskesmas Kota Tanjungpinang tahun 2022**

No	Puskesmas	Jumlah balita yang diukur	2022	
			Jlh	%
1.	Batu 10	2864	142	5,0
2.	Mekar Baru	2171	74	3,4

***Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian  
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang***

3.	Melayu Kota Piring	1347	52	3,9
Kec.Tanjungpinang Timur		6382	268	4,2
4.	Kampung Bugis	1113	59	5,3
Kec.Tanjungpinang Kota		1113	59	5,3
5.	Tanjungpinang	3093	15	0,5
Kec.Tanjungpinang barat		3093	15	0,5
6.	Sei Jang	2089	100	4,8
7.	Tanjung Unggat	704	45	6,4
Kec. Bukit Bestari		2793	145	5,2
Total		13381	487	3,64

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, 2023 (telah diolah kembali)

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus *stunting* di Kota Tanjungpinang masih belum tertanggulangi secara efektif berdasarkan pada data 5 tahun terakhir 3,3% pada tahun 2018 kemudian 1,9% pada tahun 2019 turun menjadi 1,3% pada tahun 2020 kemudian mengalami kenaikan 3,49% di tahun 2021 dan 3,91% di tahun 2022 yang terdata di 7 Puskesmas.

#### **A. PERILAKU ORGANISASI DAN ANTAR ORGANISASI**

Perilaku organisasi dan antar organisasi yaitu sikap pemerintah dalam mengimplementasikan program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Adapun dimensi dari perilaku hubungan antar organisasi adalah komitmen dan koordinasi.

Dimensinya komitmen dan koordinasi. Komitmen ialah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Tanjungpinang. Sedangkan Koordinasi dilakukan baik dalam hal pengambilan keputusan terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Tanjungpinang, melalui indikator perilaku organisasi dan antar organisasi dalam dimensi komitmen sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari Dinas Kesehatan yang berkomitmen dengan OPD lain dengan melakukan kerjasama dan bekerja dari hulunya karena ada intervensi sensitif dengan spesifik. Komitmen yang telah dibuat bersama kementrian agama, yaitu dengan membuat MoU agar

calon-calon pengantin mendapatkan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) tentang *stunting* dimasa pra nikah 3 bulan sebelum menikah. Selain itu program yang telah dibuat salah satunya yaitu: TPK (Tim Pendamping Keluarga), TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) mulai dari tingkat Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. Kemudian ada audit kasus *stunting* Mini Lokakarya untuk melihat berapa besar angka *stunting* di wilayah kecamatan dari data yang diperoleh dari TPK (Tim Pendamping Keluarga). Lalu ada Bapak Asuh, yang dijalankan oleh kepala OPD yang bersedia menyumbangkan uang secara suka rela sebesar 600.000-700.000 selama 6 bulan guna untuk memberi makan anak-anak *stunting* dan balita dibawah 2 tahun.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, melalui indikator perilaku organisasi dan antar organisasi dalam dimensi koordinasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang rutin koordinasi dengan OPD terlibat dengan mengumpulkan data setiap bulannya. Selain itu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang juga koordinasi dengan pihak swasta lintas agama dengan melakukan penanda tanganan MoU.

a) Komitmen

Komitmen ialah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang ada dalam kaitannya dengan pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Tidak mudah dalam menjaga stabilitas jaringan dimaksud, tentunya terdapat berbagai kepentingan yang diemban oleh masing-masing instansi yang terlibat. Disinilah komitmen dibutuhkan guna mencapai tujuan dari program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Sebagai implementor puskesmas juga memiliki komitmen dalam menjalankan program penanggulangan *stunting*. Pengelola Program gizi Puskesmas batu 10 menambahkan komitmen yang telah dilakukan dalam menanggulangi *stunting*.

Upaya Penanggulangan *stunting*, tidak dapat jika hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja karena penyebab munculnya *stunting* bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi saja, namun ada faktor-faktor lainnya seperti lingkungan, sosial, budaya, tempat tinggal dan lainnya. Hal ini membuat pemerintah Kota Tanjungpinang mengambil langkah tegas dengan melakukan rembuk *stunting* dan membentuk Tim Percepatan

## ***Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang***

Penurunan *Stunting* (TPPS) yang terdiri dari OPD lainnya. Pembentukan TPPS dilakukan hingga tingkat Kota, Kecamatan hingga tingkat Kelurahan.

Program pencegahan dan penanggulangan *stunting* sendiri yaitu program rutin dari Dinas Kesehatan dan puskesmas seperti Pemberian Vit A, tablet penambah darah, imunisasi, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), edukasi ibu hamil, dan lain sebagainya. Adapun bentuk kegiatannya seperti sosialisasi, penyuluhan, maupun yang lainnya yang melibatkan perangkat camat, kelurahan, PKK maupun masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan hasil observasi yang ditemukan peneliti di lapangan, tampak tenaga kesehatan dan kader posyandu tengah melaksanakan program rutin di posyandu UMMI.

Dengan demikian hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang dalam dimensi komitmen sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dilihat dari komitmen yang sudah berjalan sejak lama dan sudah terjalin komitmen dengan OPD lain dalam rembuk dan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Tanjungpinang tingkat Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. Selain itu bentuk komitmen yang dapat dilihat dari Dinas Kesehatan Bersama Puskesmas dapat dilihat dari program penanggulangan dan penurunan *stunting* yang diimplementasikan menjadi program rutin.

### **b) Koordinasi**

Koordinasi yaitu proses untuk mensinergikan dan mengarahkan pada suatu kegiatan dalam pekerjaan antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Koordinasi antar organisasi menjadi salah satu tolak ukur penilaian dalam suatu implementasi kebijakan sehingga sangat diperlukan saling mengkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Koordinasi dilakukan baik dalam hal pengambilan keputusan terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang KB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang menyatakan yang terlibat dalam menanggulangi *stunting* ini banyak. Hal yang sama juga sesuai dengan ungkapan Penata KKB Ahli Muda Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang menyatakan koordinasi yang telah dilakukan selama ini cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang sebagai salah satu elemen pencegahan *stunting* dan digerakkan oleh Wakil Wali Kota selalu melakukan koordinasi mengumpulkan data setiap bulan dengan OPD lainnya melalui TPPS Kota (Tim Percepatan Penurunan *stunting*). OPD yang terlibat diantaranya Puskesmas, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Pendidikan, BAPELITBANG, Camat, Lurah, KUA dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang dalam dimensi koordinasi sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dilihat dari koordinasi yang telah berjalan bersama dinas-dinas terkait serta pengawasan terhadap perkembangan implementasi program penanggulangan *stunting* melalui rapat dan pertemuan maupun verifikasi dan validasi data laporan.

## **B. PERILAKU BIROKRAT LEVEL BAWAH**

Salah satu faktor yang memahami implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang adalah perilaku birokrasi level bawah dimensinya yaitu diskresi. Diskresi adalah kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi).

Selanjutnya perilaku birokrasi level bawah yang dimaksud disini adalah kemampuan Puskesmas dalam menjalankan program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Kemampuan Puskesmas sebagai implementor program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang sudah merupakan ketetapan dalam program ini.

Penata KKB Ahli Muda Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang menjelaskan peran puskesmas dalam penanggulangan *stunting*. bahwa birokrasi level bawah sebagai implementor telah mengimplementasikan program penanggulangan *stunting* dengan membuat inovasi atau terobosan seperti Cabe Keriting (Cegah dan Berantas Kerdil akibat *Stunting*), Posting (Pos *Stunting*), Kemunting (Kelompok Masyarakat Peduli *Stunting*, Sitang Ating (Stop Sigap Atasi *Stunting*), dan Pos Gizi. Meski ada beberapa puskesmas yang tidak memiliki inovasi dalam memanggulangi

## ***Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang***

*stunting* namun mereka tetap menjalankan program yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan seperti Bapak Asuh dan memberikan bantuan berupa sembako kepada balita berisiko *stunting*.

Kepala Posyandu Air Raja menambahkan kendala yang sering dihadapi dan solusinya pada saat mengimplementasikan program terhadap masyarakat bahwa dalam mengimplementasikan program penanggulangan *stunting*, implementor telah melakukan diskresi. Diskresi yang dimaksud disini ialah tenaga kesehatan maupun kader posyandu melakukan *sweeping* atau kunjungan kerumah warga yang tidak dapat datang ke posyandu dan menyelesaikan permasalahan penting dilapangan dengan cepat berdasarkan kondisi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang melalui indikator perilaku birokrasi level bawah dengan dimensinya diskresi telah berjalan dengan maksimal dan diharapkan dapat terus berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan dalam mengimplementasikan program atas dasar inisiatif implementor sendiri sebagai upaya menyukseskan pelayanan publik bagi masyarakat guna menanggulangi *stunting*.

Sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam implementasi kebijakan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi kota ditingkat level bawah, Perilaku Birokrasi Level bawah dimensinya yaitu direksi. Birokrasi Level Bawah sebagai jabatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Tanjungpinang melalui indikator perilaku birokrasi level bawah dalam dimensi dikresi sudah dilakukan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan itu atas dasar inisiatif sendiri dari implementor tersebut, kemudian direksi dilakukan untuk menyukseskan pelayanan publik bagi masyarakat yang memiliki balita yang berumur dibawah dua tahun sampai pada umur lima tahun khususnya bagi masyarakat yang terdampak *stunting*. Direksi ini juga dilakukan atas dasar untuk menyelesaikan masalah penting (*emergency*) yang timbul dilapangan.

Dari hasil observasi peneliti, ditemukan bahwa implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Tanjungpinang melalui indikator perilaku birokrasi level bawah dalam dimensi direksi dilakukan agar program penanggulangan *stunting* itu sendiri dapat terus berjalan dan mencapai tujuan sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dari inovasi oleh puskesmas se-Tanjungpinang dengan membuat berbagai macam inovasi yaitu: Cegah dan Berantas Kerdil akibat *Stunting*

(Cabe Keriting), Pos *Stunting* (Posting), Kelompok Masyarakat Peduli *Stunting* (Kemunting), Stop Sigap Atasi *Stunting* (Sitang Ating), Bapak Asuh, Pos Gizi, dan pemberian bantuan kepada balita *stunting* berupa sembako.

### C. PERILAKU KELOMPOK SASARAN

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang adalah perilaku kelompok sasaran dimensinya yaitu respon positif dan respon negatif. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif ataupun respon negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada implementor terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini perilaku kelompok sasaran atau masyarakat yang terdampak kasus *stunting* di Kota Tanjungpinang mengenai penanggulangan *stunting* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.

Bahwa menghimplementasikan program, puskesmas, tenaga gizi dan kader posyandu sebagai fasilitator dan implementor program masih menghadapi kendala. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pengetahuan, keadaan ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya respon masyarakat atau dapat dikatakan sebagai bentuk respon negatif terhadap implementasi program.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang melalui indikator perilaku kelompok sasaran secara garis besar sudah berjalan dengan maksimal, Sebagian besar masyarakat merespon positif dan sebagian tidak merespon atau memberikan respon negatif. Hal ini karena masih terdapat kendala yang perlu waktu untuk menuntaskannya., sehingga implementor dapat terus memberikan edukasi dengan baik melalui sosialisasi dan penyuluhan yang berkelanjutan, melakukan inovasi melalui berbagai macam metode agar dapat lebih membangun kesadaran kelompok sasaran guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Tanjungpinang melalui indikator perilaku kelompok sasaran merespon dengan positif dan baik. Hal ini karena petugas terus melakukan pendampingan dan pemantauan yang berkesinambungan yang rutin dilakukan tiga kali dalam satu bulan. Selain melakukan pemantauan, juga melakukan konseling dengan melaksanakan penimbangan berat

## ***Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang***

badan serta pengukuran pada anak terutama yang berisiko terdampak *stunting*. Hal ini dilakukan untuk menekan angka *stunting* di Kota Tanjungpinang.

Dari hasil observasi peneliti ditemukan bahwa kelompok sasaran yaitu masyarakat yang memiliki balita merespon positif. Selain itu masyarakat juga antusias dalam melakukan pemeriksaan dan konseling ketika kegiatan yang dilakukan puskesmas sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa hasil observasi peneliti sudah sesuai dengan penjelasan indikator perilaku kelompok sasaran.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa Implementasi Program Penanggulangan *Stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota sudah berjalan maksimal. Selanjutnya dijelaskan perindikator sebagai berikut: 1) Indikator perilaku hubungan antara organisasi sudah berjalan dengan efektif dilihat dari dimensi komitmen dan koordinasi sudah adanya kesepakatan bersama dengan OPD lainnya melalui TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) dan adanya koordinasi yang dilakukan dalam hal pengambilan keputusan; 2) indikator perilaku birokrasi level bawah sudah berjalan efektif hal ini dapat dilihat dari sudah adanya inovasi dalam penanggulangan *stunting*; 3) indikator perilaku kelompok sasaran secara umum mendapatkan respon positif dari masyarakat namun masih memerlukan peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan. Implementasi program penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Penanggulangan *Stunting* di Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang untuk perbaikan yaitu lebih meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan pemahaman terhadap pola asuh anak. maka dari itu diperlukan adanya saran sebagai bahan masukan untuk program penanggulangan *stunting* sebagai berikut:

1. Untuk indikator perilaku organisasi dan antar organisasi dimensi komitmen dan koordinasi yaitu: Harapan kepada pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang agar dapat terus meningkatkan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menanggulangi

kasus *stunting* di Kota Tanjungpinang dan terus menjalin kerjasama antar OPD yang terkait dan juga memberikan pengarahan kepada Puskesmas dan Posyandu untuk terus melakukan pemantauan terhadap *stunting*.

2. Indikator Perilaku Birokrasi Level Bawah yaitu: Harapan kepada Puskesmas agar terus meningkatkan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya dalam penanggulangan *stunting* dengan terus memberikan edukasi terkait *stunting* serta memanfaatkan inovasi yang sudah dirancang dengan seefektif mungkin hingga angka *stunting* di wilayah kerja puskesmas yang ada di Tanjungpinang dapat ditekan hingga nol persen.
3. Indikator Kelompok Sasaran yaitu: Harapan kepada masyarakat, agar dapat proaktif membantu pemerintah untuk menanggulangi *stunting* di Kota Tanjungpinang dengan memperhatikan pola asuh anak agar dapat mendapatkan gizi yang lebih baik, masyarakat harus memahami dan mempelajari tentang pemenuhan gizi untuk-anak agar tidak terkena dampak gizi buruk yang dapat meningkatkan angka *stunting* di Kota Tanjungpinang.

## REFERENSI

- Arrias, J. C., Alvarado, D., & Calderón, M. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat*. 5–10.
- Debora Comini United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). *Situasi Anak Di 2020 Indonesia*. 80.
- Dermawan, Ari. Mahanim. Siregar, N. (2022). *Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Asahan*. 1(2), 99. <https://doi.org/10.56854/ba.v1i2.124>
- Djauhari, T. (2017). Gizi Dan 1000 Hpk. *Saintika Medika*, 13(2), 125. <https://doi.org/10.22219/sm.v13i2.5554>
- Farida, Y., Isnanto, & I.G.A Kusuma Astuti, N. P. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Pada Anak Balita. *Usia2*, VIII(2), 14–22.
- Keahlian, B., Ri, D. P. R., & Vanny, C. (2022). *Komisi IX Accountability Paper Percepatan Penurunan Stunting*.
- Kominfo, D. (2022). *Percepat Penurunan Stunting, Wako Rahma Dorong OPD Lakukan Aksi Nyata*.
- Laili, U., & Andriani, R. A. D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 5(1), 8. [https://doi.org/10.32528/pengabdian\\_iptek.v5i1.2154](https://doi.org/10.32528/pengabdian_iptek.v5i1.2154)
- Maieftiki, Siregar, A. P., Mariana, A., & Sartika, D. (2020). *Hubungan Pemberian Makanan Pendamping Asi Dini Dengan Pertumbuhan Bayi 0-6 Bulan Di Wilayah Kerja*. 142–149.
- Mitra, M. (2015). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan). *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2(6), 254–261. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol2.iss6.85>
- Qolbi, P. A., Munawaroh, M., & Jayatmi, I. (2020). Hubungan Status Gizi Pola Makan dan Peran Keluarga terhadap Pencegahan Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 10(4), 167–175.

***Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian  
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang***

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, cv.
- Tika, R. (2022). *Dua Kelurahan di Tanjungpinang Catat Angka Stunting Tertinggi*.  
TribunBatam.id.
- United Nations. (2018). *Global Nutrition Report [Internet]. Global Nutrition Report*.
- Yudiana, T. (n.d.). *Tjetjep Yudiana Latar Belakang Masalah Visi Indonesia Emas yang harus  
dicapai pada tahun 2045 adalah mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia  
yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi , ekonomi  
Indonesia meningkat yang* .